

PEMBELAJARAN PKN BERBASIS KONTEKSTUAL BAGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Oleh

H. Endang Dimiyati

Dosen Kopertis Wilayah IV pada Prodi PPKn STKIP Garut

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh fenomena ahir-ahir ini yang menunjukkan adanya kecenderungan sebagian masyarakat khususnya generasi muda, lebih mengagung-agungkan budaya, sistem, dan pola tata-laku kehidupan asing, ketimbang menjunjung tinggi nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai luhur bangsa yang sejatinya dipegang kuat oleh masyarakat, mulai bergeser dan bahkan ditinggalkan. Sebagai akibatnya, rasa kebangsaan dan jatidiri bangsa di kalangan generasi mudasudah mengalami erosi yang sangat tajam, hal ini dapat membahayakan kelangsungan bangsa. Masalah utama penelitian ini adalah “Bagaimana pembelajaran PKN berbasis kontekstual memberikan kontribusi bagi penguatan karakter bangsa pada peserta didik SMA di kabupaten Garut.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pembelajaran PKN berbasis kontekstual bagi upaya penguatan karakter bangsa dikalangan peserta didik SMA di kabupaten Garut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi/guru PKN di lapangan dalam upaya pengembangan kesadaran berbangsa. Target khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terciptanya model penguatan karakter bangsa melalui pembelajaran PKN berbasis kontekstual.

Kata Kunci :Pembelajaran PKN berbasis kontekstual, Penguatan Karakakter bangsa.

DASAR PEMIKIRAN

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini, terjadi karena warga negara telah kehilangan jatidiri bangsa yang pada masa lalu amat disegani dan dihormati bangsa lain. Jatidiri bangsa tersebut digambarkan sebagai kepribadian bangsa yang terwujud dalam pengamalan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Azis wahab,2009:19). Sejalan pemikiran itu, apabila kita mencermati perjalanan hidup bangsa ini, selama satu dasawarsa di era reformasi, nampak adanya indikasi bahwa bangsa ini telah kehilangan stamina dan jatidiri sebagai bangsa Timur yang memiliki falsafah hidup yang adiluhung, yaitu Pancasila. Akibatnya kondisi negeri ini semakin carut-marut (Damardjati Supadjar dalam S. Koesman, 2009:19).

Selain itu, bahwa saat ini gejolak iptek yang kian ganas melalui multi media elektronik-cetak dengan segala keindahan-kemewahan dan kemudahannya “yang serba wah” berikut tuntutan materiilnya yang cukup tinggi, melahirkan kehidupan keluarga yang sarat keinginan dan kesibukan sebagaimana “pola kehidupan (*lif style*) modern” yang pada akhirnya secara perlahan namun pasti membawa ke arah rasionalisme, sekularisme yang materialistik dan egoistik serta mulai menggeser dan mengerosi standar baku yang ada, termasuk dalam kehidupan keluarga (A.K. Djahiri (2006: 5).

Pada intinya terpuruknya bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini, sesungguhnya disebabkan oleh krisis nilai moral. Kasus tindakan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela dari hulu sampai hilir, tindak kekerasan, kriminalitas, narkoba, AIDS, runtuhnya keluarga, kehamilan di luar nikah, hilangnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan pemerintah, pertikaian SARA, korupsi, polusi dan kerusakan lingkungan adalah tanda-tanda krisis besar yang melanda Indonesia. Keadaan seperti itu, terutama krisis nilai moral terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsanya (Suresman, 2007:1).

Dunia pendidikan di Indonesia telah melupakan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan dan

seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Oleh karena itu pendidikan kita sangat memerlukan mata pelajaran- mata pelajaran yang menekankan dan berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa, *The End of Education is Character* (Ong Jumsai, 2004:12). Hasil akhir dari proses pendidikan adalah karakter. Untuk apa pendidikan jika tidak menghasilkan karakter yang baik. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengatasi kecenderungan negatif itu, diperlukan pendidikan yang mampu membangun peserta didik memiliki karakter yang baik.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting agar dapat memulihkan sikap, mental dan psikologi generasi muda bangsa, memperkokoh dan mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang untuk menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*), warga negara yang produktif dan bertanggung jawab (*productive and responsibility*), mampu bertindak local dan berfikir global (*act locally but think globally*).

PEMBELAJARAN PKn BERBASIS KONTEKSTUAL BAGI PENGUATAN KARAKTER BANGSA

Dinamika dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya terus menerus dan berkelanjutan dalam hal pengembangan kesadaran berbangsa. Pengembangan kesadaran berbangsa mengandung makna membangun kembali fondasi nasionalisme Indonesia (*Nation character building*). *Nation building* pada prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju terciptanya sebuah negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas dasar ideologinya. (Simatupang, 1980:18-23). Kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak. “Umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya” (C.S.T.Kansil 1999:20).

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Indonesia mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan atau menjadi bagian dari suatu bangsa (*nation*) dan Negara (*state*) tertentu. Demikian dengan individu yang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegarajuga memiliki keyakinan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki sikap dan perilaku rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik.

Menurut Franz Magnis Suseno dalam buku Etika Kebangsaan-Etika Kemanusiaan (2008:19), merosotnya kesadaran berbangsa dan bernegara karena empat hal sekaligus sebagai tantangan ke depan, yakni sebagai berikut:

- a. Karena globalisasi, berkat kemajuan teknologi informasi dan transportasi, menjadikan seakan-akan kita telah menjadi warga dunia sehingga identitas sebagai bangsa yang mandiri dan mempunyai karakteristik sendiri menjadi lebur dengan bangsa lain yang juga hilang identitasnya. Akibatnya, tumbuh dan muncul budaya dunia/global. Identitas sebagai bangsa semakin tidak jelas. Kedaulatan semakin menjadi mitos. Ketergantungan antar Negara semakin tinggi.
- b. Karena kepicikan perasaan kedaerahan. Otonomi daerah telah merangsang nafsu yang merasa putera-puteri daerah untuk menguasai tempat basah. Posisi politis yang strategis dilihat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dan keluarga serta membangun “kerajaan” atau “*trah*” atau “*dinasti*” baru. Mereka kehilangan wawasan dan perasaan solidaritas bangsa dan tanggung jawab untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
- c. Karena budaya *konsumisme hedonistik*. Sikap ini merupakan tantangan dan penyebab dari dalam diri kita. *Konsumisme* adalah sikap ketagihan para konsumen produk *kapitalisme* yang tidak saja para kapitalis memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk kepuasan masyarakat. Akibatnya muncul *life style* mewah yang sudah tidak memperhatikan lagi azas manfaat tetapi cenderung demi mengikuti trend gaya hidup

yang *konsumtif hedonis*. Dampaknya adalah kurang menghargai produk lokal yang dipandang kurang memberikan *pretisegaya* hidup modern yang salah diartikan.

- d. Karena ideologi-ideologi totaliter. Suatu ideologi dikatakan totaliter karena paham atau ajarannya yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak serta menuntut ketaatan tanpa *reserve*. Ideologi *komunisme* dan *nazisme* merupakan ideologi totaliter yang dikelompokkan sebagai ideologi ekstrim kiri. Sedangkan ideolog religius yang *fundamentalis* dikelompokkan sebagai ideologi totaliter/ekstrim kanan. Keduanya dapat mengancam akan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian Kesadaran nasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adalah berpikir kritis, rasional, dialektik, proaktif, dan holistik tentang hari depan bangsa berdasar pengalaman saat ini dan berdasar pengalaman masa lampau. Kesadaran yang demikian menjadi dasar untuk membangun bangsa di hari depan yang lebih baik dari pada masa lalu dan masa kini. Apabila dijabarkan prinsip-prinsip dasar nasionalisme tersebut, meliputi antara lain: 1) cinta kepada tanah air; 2) Kesatuan; 3) dapat bekerjasama; 4) demokrasi dan persamaan; 5) kepribadian; dan 6) Prestasi.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *citizenship education* atau *education for citizenship*, merupakan pendidikan yang mengarah pada upaya pembentukan karakter (*character building*) yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Cogan dalam Winataputra (2007:14) mengartikan *civic education* sebagai ‘... *the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*’. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Kemudian secara lebih fokus, Cogan (1998:13) mengemukakan bahwa:

Citizenship education has been described as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of being citizen, and the process of teaching society’s rules, institutions, and organizations, and the role of citizens in the well-functioning of society.

Berdasarkan pendapat Cogan di atas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan digambarkan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakter-karakter warganegara, dan proses tentang aturan pengajaran masyarakat, institusi, dan organisasi-organisasi, dan peran warganegara dalam masyarakat yang berfungsi secara baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan pendapat Branson (1998:8-25), yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). Yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Di lain pihak Azis wahab dan Sapriya (2011:97), menjelaskan bahwa *Civic Education* menekankan pada empat hal :

a) Pertama, *Civic Education* bukan sebagai Indoktrinasi politik, *Civic Education* sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. *Civic Education* seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab.

b) Kedua, *Civic Education* mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. *Civic education* memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

c) Ketiga, *Civic Education* adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (*watering down*) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. *Civic education* membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

d) Keempat, *Civic Education* sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian *Citizenship education* atau Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warganegara yang baik, bukan hanya dalam dimensi rasional dan intelektual semata, melainkan juga dalam bentuk dimensi spiritual, emosional dan sosial. Dengan kata lain misi pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma yang direvitalisasi, adalah mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*).

Sementara untuk mewujudkan misi PKn tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif. Maka salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan kearah itu adalah pembelajaran berbasis kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam

kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari untuk menemukan makna. Hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berfikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka panjangnya. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari untuk menemukan makna.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kontekstual dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari, terkait pembinaan kesadaran berbangsa yang terus dinamis bagi penguatan karakter bangsa pada siswa SMA di Kabupaten Garut. Dalam tujuan ini diperlukan : (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter atau sikap mental, (4) komitmen yang kuat terhadap nilai dan budaya bangsa serta prinsip fundamental konstitusional.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter menjadi kunci utama pembangunan warga Negara yang baik, sebab karakter akan menentukan wajah bangsa ini ke depan. Fenomena merosotnya jati diri dan karakter bangsa ini menjadi tanggung jawab besar pendidikan dalam menjembatani pembentukan kembali ke arah watak dan kepribadian bangsa ini ke depan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang berbasis pada pendidikan perilaku bangsa ini, harus mampu menjadi mata pelajaran yang paling terdepan dalam menghasilkan dan membangun watak bangsa ini. Oleh sebab itu melalui pembelajaran

PKn berbasis kontekstual peserta didik dipersiapkan dalam kehidupan nyata pendidikan sehingga apa yang ia terima relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Perlu dikembangkan metode dan strategi pembelajaran PKn berbasis kontekstual ini dalam upaya melahirkan generasi muda bangsa yang berkarakter sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. (2009a) *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UPI.
- Cogan, J.J., (1999), *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: [wwwCICED](http://www.CICED).
- Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: an International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Djahiri, K. (1984). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Laboratorium PMPKN IKIP Bandung.
- (2006). "Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKn di Era Globalisasi" dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Gunawan, Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian(2008). *Mencintai Bangsa dan Negara*.Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Kuswarno, Engkus, 2009. *Metodologi Penelitian komunikasi, fenomenologi, konsepsi, pedoman dan contoh penelitiannya* , Bandung: Widya Padjadjaran.

- Lickona, T. (1987). "Character development in the family" dalam *Character Development in Schools and Beyond*. New York: Praeger.
- (1992). *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Masykur, Ali musa, (2012). *Nasionalisme di persimpangan*, Jakarta: Erlangga.
- Moustakas, S.W. , 1999, *Phenomenological Research Methods*. California : SAGE publication
- Mujiyanto, bambang (2007), *Metode Fenomenologi sebagai salah satu metodologi penelitian kualitatif dalam komunikasi*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan opini publik .
- Robertson, R. (1992). *Globalization Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publication.
- Sabatini, C.A., Bevis, G.G., Finkel, S.E. (1998). *The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Somantri, Numan. (1975). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- Suryadi, Ace (2009) *Membangun Kompetensi SDM Yang mampu Bersaing di Era Global Melalui PKn (Masalah dan Tantangannya)*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- UNESCO-APNIEVE.(2000), *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni: Pendidikan Nilai untuk Perdamaian, Hak-hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kawasan Asia-Pasifik*, Buku Sumber UNESCO-APNIEVE untuk Pendidikan Guru dan Jenjang Pendidikan Tinggi, Kantor Prinsipal UNESCO untuk Kawasan Asia Pasifik, Bangkok dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- The International Commission on Education for the Twenty-First Century. (1996). *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of The International Commission on Education for the Twenty-First Century.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.

- World Commission on the Social Dimension of Globalization. (2004). *A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*. New York: ILO Publication.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia.*, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.